# **BAB** **II TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. **Tinjauan Literatur**

Literatur pertama yaitu berupa artikel yang berjudul *The U.S. Nuclear Umbrella over South Korea: Nuclear Weapons and Extended Deterrence*, ditulis oleh Terence Roehrig pada tahun 2017, dengan publikasi melalui *Political Science Quarterly Volume 132 Number 4 2017-18**.* Tulisan ini membahas terkait Teori *Extended Deterrence* dan *Nuclear Umbrella*, kapabilitas dari penggunaan senjata nuklir, sejarah *Nuclear Umbrella* di Korea Selatan, nuklir Korea Utara yang mengancam ketahanan *Nuclear Umbrella*, kalkulasi Korea Selatan di bawah *Nuclear Umbrella*, motivasi, kapabilitas, kredibilitas dari *Nuclear Umbrella* Amerika Serikat, hingga implikasi dari *Extended Deterrence* dari Nuclear Umbrella Amerika Serikat.

Artikel ini lebih membahas kepada pertimbangan Amerika Serikat selaku penyedia payung nuklir dalam konteks terkait serangan balasan atau membela Korea Selatan jika sewaktu-waktu Korea Utara benar-benar melakukan penyerangan dalam waktu yang akan datang. Keraguan juga datang dari sisi Korea Selatan dimana dikatakan bahwa jika Korea Utara meluncurkan missile dengan huku ledak nuklir, mereka ragu bahwa Amerika Serikat akan membela sisi pertahanan Korea Selatan dengan meluncurkan serangan balik. Maka dari itu, Korea Selatan ingin Amerika Serikat mengubah taktik terkait serangan dan pertahanan nuklir untuk menghambat Korea Utara dengan lebih efektif lagi.

Selain itu, artikel ini menggunakan beberapa teori yang relevan seperti *Extended Deterrence, Nuclear Deterrence* dan *Umbrella.* Penulis juga menganalisis *Extended Deterrence* yang dijalin oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat melalui beberapa indikator seperti *Deterrence Situation* terkait situasi yang dihadapi Korea Selatan, ada pula *Primary versus extended deterrence* dimana Amerika Serikat yang akan menjadi tameng atas serangan dari Korea Utara, *Immediate versus general deterrence* menegaskan bahwa tipe strategi *deterrence* pasti akan terus berubah seiring dengan pergerakan Korea Utara. Hingga yang terakhir, konsep analisis *Credebility* dan *Certainty of Retaliation* terkait Amerika Serikat dan penyerang potensial yaitu Korea Utara.

Literatur kedua yaitu berupa artikel yang berjudul *Nuclear Weapons and Extended Deterrence in the U.S.-ROK Alliance*, ditulis oleh Wade L. Huntley pada tahun 2014, dengan publikasi melalui *CNA-KIMS Conference on Maritime Security Vol.17 No.2, 2014.* Tulisan ini dalam garis besar membahas terkait Kebijakan Nuklir Amerika Serikat, sejarah atau asal-usul Payung Nuklir Amerika Serikat hingga kedatangan Amerika Serikat di Korea Selatan, *Extended Deterrence* kedua negara hingga strategi menuju konsep *Extended Deterrence* yang lebih luas.

Artikel ini lebih membahas kepada kredibilitas atau kerelevansian *Extended Deterrence* dalam konteks nuklir kedua negara yang dianggap melemah, baik dalam konteks militeristik konvensional maupun dalam konteks nuklir sekalipun. Keduanya dianggap belum bisa menghalangi ancaman Korea Utara. Kehadiran hulu ledak nuklir milik Amerika Serikat yang dinamai B-2 ternyata tidak menghadang Korea Utara. Terbukti dengan insiden penyerangan Cheonan dan Yeonpyeongdo pada waktu lalu.

Dalam penggunaan teori dan konsep, artikel ini berangkat mulai dari Kebijakan Nuklir Amerika Serikat selepas Perang Dingin dengan *Nuclear Posture Review* pada era kepresidenan George W. Bush, yang dilanjut dengan *Non-Proliferation of Nuclear Weapons* bagi negara-negara yang berada di bawah perlindungan Amerika Serikat dimana negara-negara tersebut telah setuju untuk tidak memiliki senjata nuklir karena telah disediakan oleh Amerika Serikat. Serta yang terakhir tidak lupa *Extended Deterrence* yang digunakan pula untuk menganalisis kebijakan-kebijakan terkait *deterrence* antar kedua negara.

Literatur ketiga yaitu berupa artikel yang berjudul Analisis Pengaruh Kebijakan Extended Deterrence Dalam Aliansi Amerika Serikat-Korea Selatan Terhadap Stabilitas Keamanan Di Asia Timur, ditulis oleh Nizar Lukman, Mala Mardialina, Khairur Rizki, dengan publikasi melalui *IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse Vol. 2 Ed.1. Pages 1 - 13, January - June 2020*. Tulisan ini dalam garis besar membahas terkait stabilitas keamanan Asia Timur yang dipengaruhi akibat Perang Dingin, *Extended Deterrence* yang dijalin oleh Korea Selatan-Amerika Serikat, serta pengaruh *Extended Deterrence* kedua negara terhadap stabilitas keamanan Asia Timur.

Artikel ini membahas kepada kompleksitas keamanan di Asia Timur dimana penulis mengatakan bahwa kerjasama komprehensif di kawasan ini belum tercipta karena banyaknya pihak yang berselisih dan keterlibatan pihak luar kawasan yang memiliki peranan besar di Asia Timur. Salah satunya adalah *Extended Deterrence* yang dijalin oleh Korea Selatan-Amerika Serikat yang merupakan dampak dari Perang Dingin yang masih berlangsung hingga sekarang. Aliansi yang dijalin oleh kedua negara pada akhirnya memancing respon dari negara-negara sekitar yaitu China dan Korea Utara.

Selain itu, terdapat pula beberapa teori konsep yang digunakan penulis untuk membantu menganalisis peristiwa tersebut dengan jelas seperti *Balance of Power* serta *Regional Security Complex* selain *Extended Deterrence*. *Balance of Power* digunakan untuk menganalisis kestabilan keamanan kawasan yang berusaha untuk dicapai di kawasan Asia Timur seiring dengan kehadiran Amerika Serikat yang menjalin *Extended Deterrence* dengan Korea Selatan. Sedangkan *Regional Security Complex* digunakan untuk menganalisis bagaimana sulitnya meraih kestabilan kawasan akibat kehadiran suatu entitas yang memiliki *power* besar yaitu Amerika Serikat.

Literatur keempat yaitu buku yang berjudul *Japan, South Korea, and the United States Nuclear Umbrella*, ditulis oleh Terence Roehrig, dengan publikasi melalui *Columbia University Press* pada tahun 2017. Buku ini dalam garis besar membahas terkait konsep, sejarah *Extended Deterrence* dan *Nuclear Umbrella*, kompleksitas keamanan Asia Timur, aliansi dan Extended Deterrence Korea Selatan-Amerika Serikat hingga implikasi *Extended Deterrence* di Korea Selatan di bawah *Nuclear Umbrella* Amerika Serikat.

Tulisan ini lebih berfokus kepada tanggapan bantuan militeristik konvensional Amerika Serikat tidak akan membuat Korea Utara melakukan sesuatu yang akan membawanya kepada respon nuklir dari Amerika Serikat, atau singkatnya mengatakan bahwa kebijakan *deterrence* ini telah berhasil. Meskipun Korea Utara juga memiliki aspek militeristik konvensional dan persenjataan nuklir yang teruss berkembang, mereka tidak akan pernah bisa menandingi kemampuan militeristik konvensional Amerika Serikat.

Ada pula teori dan konsep yang digunakan dalam buku tersebut yaitu *Deterrence Theory* yang mencakup *Extended Deterrence* dan *Nuclear Deterrence*, *Deterrence Situation* yang mencakup *Primary Versus Extended Deterrence,* *Immediate Versus General Deterrence*, *Symmetric Versus Asymmetric Deterrence*, hingga *Rationality* dan *Credibility*. Masih sama dengan beberapa jurnal di atas, *Extended Deterrence*, *Nuclear Deterrence* serta konsep *Rationality* dan *Credibility* digunakan untuk menganalisis hubungan aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat dalam menghadapi bayang-bayang ancaman nuklir yang selalu muncul disebabkan oleh Korea Utara.

Singkatnya, jurnal pertama membahas terkait kebijakan Nuclear Umbrella dari kacamata Amerika Serikat dimana Amerika Serikat juga sedang mempertahankan hegemoninya serta menahan Korea Selatan sendiri untuk membangun nuklir, disamping beraliansi secara militeristik. Jurnal kedua membahas terkait kredibilitas *Extended Deterrence* dua negara tersebut yang dianggap melemah, namun masih dianggap bahwa kebijakannya berhasil untuk menangkal Korea Utara.

Jurnal ketiga lebih membahas kompleksitas kawasan Asia Timur karena kehadiran Amerika Serikat membuat Korea Utara tidak mau meredam tindakan ofensifnya karena merasa kepentingannya terancam. Terakhir, buku ini membahas terkait anggapan jika Korea Utara menyerang Korea Selatan, sebagai mitra aliansinya, Amerika Serikat akan membalas dengan militer konvesionalnya dan tidak akan menggunakan hulu ledak nuklir karena menganggap kemampuan Korea Utara masih jauh di bawah Amerika Serikat.

Dari keempat literatur yang telah dicantumkan, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan topik penelitian yang akan dikaji oleh penulis saat ini diantaranya adalah membahas aliansi yang dijalin oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat termasuk kebijakan-kebijakannya, sejarah, implikasi, serta anggapan apakah aliansi ini telah berhasil atau tidak dalam menangkal serangan Korea Utara sebagai persamaan.

Walaupun literatur tersebut cukup relevan dengan tema yang akan diangkat oleh penulis saat ini, namun terdapat beberapa perbedaan terkait keempat literatur tersebut dimana keempatnya membahas aliansi dan ancaman Korea Utara dari kacamata Amerika Serikat sedangkan penulis akan mengangkat dari kacamata Korea Selatan. Ada pula beberapa teori atau pendekatan pula yang berbeda hingga yang paling penting adalah perbedaan tafsir terkait pengimplikasian teori *deterrence* yang berkaitan dengan rumusan masalah penulis dalam studi kasus daya tangkal aliansi Korea Selatan-Amerika Serikat terhadap Korea Utara.

**Tabel 2.2 Tinjauan Literatur**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Judul** | **Penulis** | **Persamaan** | **Perbedaan** |
| 1 | The U.S. Nuclear Umbrella over South Korea: Nuclear Weapons and Extended Deterrence | Terence Roehrig | Tulisan ini sama-sama membahas terkait Sejarah Aliansi Amerika Serikat-Korea Selatan, bagaimana Extended Deterrence yang dijalin kedua negara dalam menahan Korea Utara, Implikasi Extended Deterrence dalam Nuclear Umbrella terhadap Korea Utara, serta pembahasan daya tangkal yang dirasa masih kurang untuk menangkal Korea Utara.  Teori dan konsep yang digunakan pula sama-sama menggunakan Extended Deterrence, dan Nuclear Umbrella. | Tulisan ini tidak membahas dari kacamata Korea Selatan, serta belum membahas bagaimana keberhasilan dari daya tangkal yang tercipta, apakah sebenarnya berhasil atau tidak yang dilihat dari faktor-faktor maupun indikator dan teori *deterrence*.  Dari segi Teori dan Konsep, tidak menggunakan Neorealisme. |
| 2 | Nuclear Weapons and Extended Deterrence in the U.S.-ROK Alliance | Wade L. Huntley | Tulisan ini sama-sama membahas terkait Sejarah Aliansi kedua negara dari Perang Dingin hingga Perang Korea, termasuk bagaimana kedatangan Amerika Serikat di Korea Selatan, Extended Deterrence kedua negara hingga membahas Implikasi Extended Deterrence hingga pembahasan persepsi daya tangkal yang telah tercipta ternyata masih diragukan.  Teori dan konsep sama-sama menggunakan Extended Deterrence. | Tulisan ini hanya menyinggung sedikit tanpa disertai indikator-indikator dan teori terkait bagaimana keberhasilan dari daya tangkal yang tercipta,  Teori dan Konsep tidak menggunakan Neorealisme. |
| 3 | Analisis Pengaruh Kebijakan Extended Deterrence Dalam Aliansi Amerika Serikat-Korea Selatan Terhadap Stabilitas Keamanan Di Asia Timur | Nizar Lukman, Mala Mardialina, Khairur Rizki | Tulisan ini sama-sama membahas Kompleksitas Keamanan Asia Timur, Kehadiran Amerika Serikat di Asia Timur, hingga Aliansi yang dijalin kedua negara. | Tulisan ini belum membahas apakah daya tangkal yang tercipta berhasil atau tidak walaupun telah disebutkan bahwa *Extended Deterrence* kedua negara yang dijalani berdampak buruk kepada stabilitas keamanan Asia Timur.  Teori dan Konsep tidak secara gamblang menggunakan *Extended Deterrence* dan Neorealisme. |
| 4 | Japan, South Korea, and the United States Nuclear Umbrella | Terence Roehrig | Tulisan ini sama-sama membahas Sejarah dari Aliansi kedua negara baik dari Perang Dingin dan berlanjut kepada Perang Korea, membahas kebijakan-kebijakan Extended Deterrence, hingga pembahasan mengenai Payung Nuklir milik Amerika Serikat.  Teori dan Konsep sama-sama menggunakan Deterrence Theory, Extended Deterrence dan Nuclear Umbrella. | Tulisan ini mengatakan bahwa daya tangkal yang diciptakan telah berhasil tanpa indikator analisis yang maksimal seperti tidak adanya pertimbangan dari sisi politik internasional serta tahun analisis yang berbeda mengingat politik internasional terus berjalan dinamis.  Teori dan Konsep tidak menggunakan Neorealisme. |

* 1. **Kerangka Teoritis/Konseptual**
     1. ***Neorealisme***

Neorealisme atau Struktural Realisme hadir sebagai salah satu teori yang lahir dari pemikiran Realisme Klasik lebih lanjut. Kenneth Waltz dalam bukunya mengatakan bahwa penyebab peperangan bukanlah karena sifat manusia, bukanlah karena sistem internal beberapa negara, melainkan karena struktur internasional yang anarki (Ababakr, 2021). Kenneth Waltz mendeskripsikan anarki yaitu “*anarchy is taken to mean not just the absence of government but also the presence of disorder and chaos*.”

Anarki bukan hanya diartikan sebagai tidak adanya pemerintahan dalam struktur internasional melainkan diartikan pula sebagai adanya ketidakteraturan dan kekacauan (Waltz, 1979). Struktur internasional, serta bagaimana pengaruhnya yang mempengaruhi perikalu negara-negara dianggap sebagai pemain yang utama dalam sistem internasional.

Terdapat beberapa pola dari perilaku negara-negara dalam politik internasional yang mencerminkan keadaan anarki diantaranya adalah negara yang tidak percaya dan mencurigai satu sama lain yang didasari oleh ketakutan dan kenyataan bahwa negara yang satu dapat menyerang negara lain (Havercroft & Prichard, 2017), negara yang memiliki tujuan untuk memastikan kelangsungan hidupnya sendiri seiring anggapan bahwa negara lain merupakan ancaman potensial, hingga negara-negara yang erusaha untuk memaksimalkan kemampuan *power* nya masing-masing (Lechner, 2017).

Seperti apa yang dikemukakan oleh Kenneth Waltz:

Whether or not by force, each state plots the course it thinks will best serve its interests. If force is used by one state or its use is expected, the recourse of other states is to use force or be prepared to use it singly or in combination. No appeal can be made to a higher entity clothed with the authority and equipped with the ability to act on its own initiative. Under such conditions the possibility that force will be used by one or another of the parties looms always as a threat in the background.

Dimana setiap negara akan selalu mementingkan kepentingan nasionalnya bahkan jika artinya harus memakai kekuatannya sendiri untuk mencapai kepentingan. Hal ini kemudian membuat negara lain juga harus ‘mempersiapkan kekuatannya’ atau ‘beraliansi’ agar tidak menjadi korban dari perilaku-perilaku yang biasanya bersifat ofensif dari negara lain (Waltz, 1979).

Struktur internasional yang anarki pada akhirnya melahirkan pemahaman rasional terkait tidak adanya suatu otoritas yang dapat menjamin atau menjanjikan adanya keamanan dari setiap negara yang kemudian melahirkan pula anggapan kedua dimana tiap negara harus selalu sigap untuk menolong dirinya sendiri supaya tidak menjadi korban dari perlakuan negara lain (*Self-Help*) (Dharmaputra, 2016).

*Self-Help* merupakan suatu istilah yang digagas oleh Waltz yang diartikan “a *system is one in which those who do not help themselves, or who do so less effectively than others, will fail to prosper, will lay themselves open to dangers, will suffer.”* (Waltz, 1979).

Kemudian, *balance of power* atau konsep perimbangan juga merupakan salah satu pembahasan sentral dalam lingkup neorealisme. Waltz berargumen bahwa “*only if survival is assured can states safely seek such other goals as tranquility, profit, and power*” yang artinya potensi *balance of power* akan terlihat bila adanya tatanan sistem yang anarki, hingga sistem tersebut penuh dengan unit atau diartikan sebagai negara saling berusaha untuk bertahan hidup (Waltz, 1979). Lebih lanjut, Waltz berargumen “*if states wished to maximize power, they would join the stronger side, and we would see not balances forming but a world hegemony forged. This does not happen because balancing, not bandwagoning, is the behavior induced by the system*”

Yang berarti jika suatu negara melihat negara lain sebagai ancaman yang mengancam kedaulatan maupun kelangsungan hidup, tanpa ragu, negara tersebut akan berusaha untuk mengimbangi dalam konteks kekuatan, dengan menghitung tingkat resiko sekaligus tingkat ancaman dalam pengambilan suatu keputusan atau *decision-making*.

Dalam sistem polaritas dunia, ini ditentukan oleh distribusi kekuasaan di antara negara-negara di dalam sistem. Waltz mengatakan bahwa jika ada lebih dari dua kekuatan besar dalam sistem atau multipolar, *balance of power* akan lebih sulit diraih karena kestabilan yang yang akan sulit dicapai. Ia berargumen, “*given two coalitions, for example, the greater success of one in drawing members to it may tempt the other to risk preventive war, hoping for victory through surprise before disparities widen*.” Dalam artian, keberhasilan dari satu pihak membuat pihak satunya memiliki besar keyakinan untuk tidak melakukan hal-hal yang ofensif (Waltz, 1979).

Sistem aliansi yang dijalin antar negara-negara identik dengan polaritas multipolar mengingat dalam polaritas multipolar, ada banyak aktor yang membuat interaksi maupun konflik menjadi sulit untuk di prediksi. Karena hal tersebut, suatu aliansi harus tetap kekal agar kemungkinan untuk meninggalkan aliansi dan bergabung dengan pihak lawan dapat diminimalisir. Jika terdapat salah satu pihak yang meninggalkan aliansi, anggota yang lainnya mungkin untuk mendapatkan masalah besar lanjutan karena ketergantungan yang tinggi (Waltz, 1979).

Seperti yang telah dikatakan di awal, perimbangan kekuatan akan sulit untuk diraih jika polaritas dunia telah beralih kepada multipolar. Dalam sistem bipolar, sumber ancaman lebih jelas yaitu negara adidaya lainnya. Selain itu, dalam konteks bipolar, aliansi cenderung takut untuk kehilangan perlindungan negara adidaya. Sedangkan dalam multipolar, negara adidaya satu malah takut kehilangan aliansinya yang sama kuat atau memilki distribusi power yang tidak jauh untuk pergi (Brooks & Wohlforth, 2016). Intinya pada sistem multipolar, ancaman yang muncul sering kali tidak pasti karena salah satu mitra aliansi dapat berpindah haluan begitu saja. Sedangkan dalam sistem bipolar, ancamannya jelas datang dari negara adidaya yang satunya.

Kompleksitas keamanan yang lahir di kawasan Asia Timur maupun internasional pada akhirnya membuat Korea Selatan mau tidak mau harus mengambil tindakan rasional untuk melindungi negaranya sendiri (*Self-Help*) dengan cara menjalin aliansi bersama Amerika Serikat. Aliansi ini juga telah terjalin semenjak era Perang Dingin dimana polaritas dunia masih bipolar. Hingga saat ini, Korea Selatan masih bergantung kepada Amerika Serikat dalam konteks keamanan dan militeristik dengan harapan akan menciptakan perimbangan kekuatan di kawasan Asia Timur mengingat pula terdapat aktor besar salah satunya adalah China dan Korea Utara.

* + 1. ***Deterrence***

*Deterrence* merupakan salah satu konsep yang diadopsi dalam lingkup Hubungan Internasional. Paul Huth mengemukakan bahwa deterrence merupakan sebuah konsep yang dapat didefinisikan sebagai “*as the use of threats by one party to convince another party to refrain from initiating some course of action*.” (Huth, 1999). Yaitu berupa penggunaan ancaman oleh suatu pihak yang bertujuan untuk meyakinkan pihak lain agar menahan diri dari memulai tindakan-tindakan yang pada dasarnya bersifat *offensive*.

Lebih lanjut, Huth juga mengemukakan bahwa ancaman disini bertujuan untuk “*serves as a deterrent to the extent that it convinces its target not to carry out the intended action because of the costs and losses the target would incur*.” Yang diartikan untuk mengukur sejauh mana pihak yang mengadopsi *deterrence* berusaha meyakinkan pihak lain atau target untuk tidak melakukan tindakan yang meunju *offensive*. *Deterrence* biasanya dikemas dalam sebuah kebijakan, “*it should be clear, however, that policies of deterrence in international politics can include both military and non-military threats that are intended to prevent both military and non-military courses of action by other states.”* yang dalam pelaksanaannya dapat meliputi tindakan militer maupun non-militer dimaksudkan untuk mencegah tindakan militer juga non-militer dari pihak atau negara lain (Huth, 1999).

Alexander George dalam bukunya berargumen bahwa “*the most reliable benefit successful deterrence can offer is more time-time in which some of the conflict-generating or conflict-exacerbating elemnts in historical situation can abate, so that deterrence will no longer be necessary or at any rate, so critical for the maintenance of peace*.” (George L & Smoke, 1974), yang mana kebijakan *deterrence* jika berhasil, akan merujuk kepada perdamaian atau perimbangan kekuatan sehingga strategi pencegahan-pencegahan tidak lagi diperlukan. Yang penting selanjutnya adalah pemelihara perdamaian.

*Deterrence* dalam pelaksanaannya memberi waktu kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk menyesuaikan kepentingan mereka masing-masing jika ada yang bertentangan. Dengan tujuan akhir yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah mengurangi ketegangan serta mengurangi potensi konflik terbuka, sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Alexander George “… *deterrence gives the opposing parties time to work out an accommodation of their conflicting interests, thereby reducing tensions and the potential for overt conlict in their relationship*.” Hubungan antar aktor pada konsep deterrence dapat terjadi dalam ruang lingkup sistem internasional yang selalu dinamis, dan bukan tidak mungkin untuk menghasilkan kompleksitas keamanan yang besar pula nantinya (George L & Smoke, 1974).

Paul Huth dalam keberhasilan deterrence juga mengemukakan beberapa poin seperti:

a successful policy of deterrence must be understood in both political and military terms. Militarily, general deterrence success refers to preventing state leaders from issuing military threats and actions that escalate peacetime diplomatic and military competition into a crisis or militarized confrontation which threatens armed conflict and possibly war.

… if armed conflict is avoided at the price of diplomatic concessions to the maximum demands of the potential attacker under the threat of war, then we cannot claim that deterrence has succeeded.

Yang diartikan kebijakan strategi *deterrence* pada akhirnya dapat dikatakan berhasil yang dilihat melalui bagaimana para pemimpin negara terkait mengeluarkan ancaman serta tindakan militer terkait kemungkinan konflik bersenjata berdasarkan potensi konflik yang muncul. Walaupun konflik bersenjata dapat dihindari, namun bila suatu negara masih berada di bawah bayang-bayang ancaman perang maka kebijakan strategi *deterrence* belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya (Huth, 1999).

Kemudian, terdapat setidaknya tiga indikator yang menentukan kegagalan atau keberhasilan dari strategi kebijakan deterrence berdasarkan studi kasus menurut Patrick Morgan yaitu “*Level of Aggressor Motivation, Clarity About the Object of Deterrence and Actions the Defender Will Take*, serta *Aggressor Must Be Confident That Deterring State Has Capability and Will to Carry Out Threats”* (Morgan M, 1977).

*Level of Aggresor Motivation* maksudnya adalah jika suatu negara melihat alasan yang sedikit untuk melakukan suatu agresi, maka *deterrence* mudah untuk dicapai. Namun sebaliknya, jika negara merasa hanya dengan agresi kepentingannya bisa dilindungi, maka *deterrence* hampir tidak mungkin atau sulit untuk dicapai. *Level of Aggresor Motivation* ini merupakan faktor terpenting dalam *deterrence*. Pada akhirnya, penggabungan antara ancaman dan perdamaian merupakan salah satu pilihan terbaik dengan bersikap keras tetapi tidak mengintimidasi (Mazar J, 2021).

Dalam konteks yang pertama, dari rentang tahun 2016 hingga 2022, Korea Selatan masih saja dihantui oleh perilaku-perilaku ofensif dari Korea Utara sebagai penyerang agressor. Korea Utara diketahui memecahkan rekor pada tahun 2022 dalam konteks uji coba rudal karena telah meluncurkan kurang lebih sebanyak 70 buah rudal (Missile Defense Project, 2023). Maka dari itu, *Level of Agressor Motivation* dalam artian Korea Utara, termasuk ke dalam kategori deterrence yang akan sulit dicapai.

*Clarity About the Object of Deterrence and Actions the Defender Will Take* yaitu terkait dimana *deterring state* harus paham betul tentang apa yang coba untuk dicegah, memastikan agressor atau penyerang potensial memahami pesan yang disampaikan, serta strategi seperti apa selanjutnya bila ancaman yang diberikan diabaikan oleh agressor. *Deterring state* tidak hanya harus tepat dalam komitmen melainkan juga harus memastikan bahwa penyerang potensial memahami dengan jelas. *Deterring state* juga harus mengadopsi decision-making yang rasional agar tidak terlihat seperti seakan memprovokasi lebih jauh (Mazar J, 2021).

*Deterring state* disini terdapat dua negara pokok yaitu Korea Selatan dan Amerika Serikat. Dalam menangkal serangan Korea Utara, kedua negara ini tampaknya belum menemukan kebijakan yang tepat walaupun keduanya telah beraliansi semenjak era Perang Korea hingga sekarang yang terbukti dengan Korea Utara masih belum mau meredam serangan-serangannya. Yang berarti *deterring state* belum memahami apa yang diinginkan oleh Korea Utara sebagai agressor.

Kemudian yang terakhir ada *Aggressor Must Be Confident That Deterring State Has Capability and Will to Carry Out Threats* dimana penyerang potensial harus mempercayai bahwa *deterring state* memiliki kemampuan dan tidak akan ragu-ragu untuk membalas, karena deterrence bergantung kepada persepsi tekad untuk memenuhi ancaman jika perlu serta keyakinan bahwa ancaman tersebut pada akhirnya akan dilakukan. Walaupun demikian, komitmen saja mungkin tidak cukup. *Deterring state* harus menunjukkan bahwa ia tidak punya pilihan lain selain beraksi (Mazar J, 2021).

Penyerang potensial atau Korea Utara pada dasarnya harus mempercayai secara penuh kepada *deterring state* agar kebijakan yang digagas oleh *deterring state* bisa berhasil. Namun, telah diketahui bahwa kehadiran Amerika Serikat disini lah yang membuat Korea Utara merasa kehadiran dan kepentingan nasionalnya terusik. Maka dari itu, dapat disimpulkan Korea Utara tidak mempercayai *deterring state*.

* + 1. ***Extended Deterrence***

Selain deterrence, Paul Huth juga mengemukakan argumennya dalam definisi Extended Deterrence. Ia mengatakan:

a confrontation in which the policymakers of one state ("defender") threaten the use of force against another state ("potential attacker") in an attempt to prevent that state from using military force against an ally—or territory controlled by an ally ("prote'ge'")—of the defender. The objective of extended deterrence is to protect other countries and territories from attack, as opposed to preventing a direct attack on one's own national territory.

Yaitu *Extended Deterrence* atau *deterrence* yang diperluas merupakan konsep turunan dari deterrence dimana negara pembela pembuat kebijakan terkait mengancam penggunaan kekuatan terhadap agresor atau penyerang potensial dalam rangka mencegah penyerang potensial untuk menggunakan kekuatan yang bersifat militeristik. *Extended Deterrence* bertujuan untuk melindungi suatu negara yang beraliansi dari serangan penyerang potensial (Huth, 1988).

Dalam *Extended Deterrence*, negara pembela harus memiliki peran yang penting lebih dari satu yaitu mereka harus meyakinkan aliansinya terkait komitmen perlindungan yang kokoh dan tak tergoyahkan, hingga berupaya untuk selalu mencegah penyerang potensial untuk menyerang negara aliansi atau klien dengan kebijakan-kebijakan terkait (Lee, 2021). *Extended Deterrence* dalam pelaksanaannya dipertahankan oleh “*arms races, the formation of alliances, and in the declaratory statements of foreign policy leaders as to their country's security interests*.” (Huth, 1988).

* + 1. ***Nuclear Umbrella***

*Nuclear Umbrella* merupakan bagian dari *Extended Deterrence* yang merujuk kepada kerjasama dalam konteks militeristik antara setidaknya dua negara. Dua negara ini terdiri dari negara yang memiliki senjata nuklir setuju dan berkomitmen, tertuang dalam perjanjian untuk bersedia melindungi negara yang tidak memiliki nuklir dengan senjata nuklir. Begitupun dengan negara yang tidak memiliki nuklir, mereka harus menyetujui terkait adanya potensi penggunaan senjata nuklir dalam pertahanan keamanan negara mereka. *Nuclear Umbrella* pada akhirnya muncul ketika negara yang bersenjata nuklir dibutuhkan untuk menlindungi dan menjamin keamanan negara non-nuklir dalam lingkup aliansi, yang dibentuk melalui komitmen politik (NUCLEAR UMBRELLA ARRANGEMENTS AND THE TREATY ON THE PROHIBITION OF NUCLEAR WEAPONS, 2018).

*Nuclear Umbrella* juga terikat dengan praktik *Nuclear Deterrence* yang menjadi sebuah hasil akhir. Hal tersebut erat kaitannya dengan kemampuan negara yang menyediakan payung nuklir dalam bagaimana mereka meyakinkan kepada penyerang potensial bahwa mereka akan benar-benar memberikan ancaman-ancaman yang nyata. Walaupun demikian, keberhasilan tergantung pula pada persepsi penyerang potensial karena tidak semua aktor memiliki kepercayaan dan pemahaman yang sama hingga pada akhirnya tidak ada pula kepastian mutlak bahwa *Nuclear Umbrella* yang disediakan akan berfungsi sebagaimana mestinya (“Nuclear Deterrence Discourse: Knowledge, Assumptions, Uncertainties and Policy Implications,” 2020).

Dalam menghadapi ancaman-ancaman rudal balistik maupun nuklir dari Korea Utara, Korea Selatan mau tidak mau harus mengadopsi kebijakan-kebijakan deterrence demi mempertahankan keamanan nasionalnya. Hal ini tidak terlepas dari sejarah yaitu Perang Korea yang merupakan salah satu dari banyaknya dampak berkepanjangan dari munculnya Perang Dingin. Amerika Serikat hadir di belakang Korea Selatan hingga pada akhirnya sepakat untuk menandatangani pakta perjanjian terkait keamanan dan militeristik. Amerika Serikat hadir sebagai payung nuklir bagi Korea Selatan, dimana diartikan jika Korea Utara sewaktu-waktu berani menggunakan senjata-senjata dengan hulu ledak nuklir, maka Amerika Serikat tidak akan segan-segan untuk memberi ancaman serupa dengan persetujuan dari Korea Selatan.

* + 1. **Kepentingan Nasional**

Joseph Frankel mendefinisikan Kepentingan Nasional sebagai sebuah konsep yang digunakan untuk “*to explain, evaluate, rationalize or criticize foreign policy. Its main role is to 'prove' oneself right and one's opponents wrong*” (Frankel, 1970). Kepentingan Nasional disini biasa merujuk kepada konteks Kebijakan Luar Negeri, dimana Kepentingan Nasional menurut Joseph Frankel dipahami sebagai alat untuk menjelaskan, mengevaluasi, maupun merasionalisasi dan mengkritik Kebihakan Luar Negeri.

Kepentingan Nasional juga dianggap harus dapat membantu menjelaskan apa tujuan, pergerakan hingga arah dari Kebijakan Luar Negeri dalam beberapa cara seperti dengan membantu melihat kebijakan yang bagus dan terbuka terhadap evaluasi, serta dengan membandingkan dan mempertimbangkan aspirasi-aspirasi berdasarkan kebijakan sebenarnya (Frankel, 1970).

Selain itu, Jack C. Plano dan Roy Olton mendeskripsikan Kepentingan Nasional dengan kalimat yang mudah dimengerti. Mereka berargumen bahwa Kepentingan Nasional ialah “*typically a highly generalized conception of those elements that constitute the states most vital needs. These include sell-presevation, independence, territorial integrity, military security, and economic well-being*.” (Plano & Olton, 1988). Yaitu Kepentingan Nasional merupakan konsep yang diadopsi oleh suatu negara dan berisikan elemen-elemen vital atas kebutuhan negara tersebut. Kemerdekaan, keberlangsungan suatu negara, integritas teritorial, keamanan militer hingga kesejahteraan ekonomi merupakan elemen-elemen yang berada pada konsep Kepentingan Nasional.

Kemudian, hal lain yang perlu di garis bawahi adalah “*when their interests are harmonious, states often act in concert to solve mutual problems; when their interests conflict, however, competition, rivalry, tension, fear, and, ultimately, war may result.”* Jack C. Plano dan Roy Olson mengemukakan bahwa jika kepentingan-kepentingan antara negara satu dengan yang lainnya selaras, mereka akan bergabung untuk mencapai kepentingannya secara bersamaan. Namun sebaliknya, jika bertentangan, bukan tidak mungkin konflik maupun perang dapat terjadi.

Walaupun pembuat keputusan pada akhirnya harus berhadapan dengan banyak pihak dalam lingkup internasional, konsep Kepentingan Nasional selalu menjadi faktor yang terpenting dan berfungsi sebagai dasar atau pedoman bagi pembuat keputusan dalam proses kebijakan khususnya Kebijakan Luar Negeri (Plano & Olton, 1988). Persoalan persamaan kepentingan dan kepentingan yang bertentangan merupakan masalah yang dihadapi baik oleh Korea Selatan, Amerika Serikat maupun Korea Utara.

* 1. **Asumsi Penelitian**

Berdasarkan kerangka pemikiran dan perumusan masalah di atas, maka penulis merumuskan asumsi penelitian yang kebenarannya masih perlu di uji sebagai berikut:

1. Merujuk pada definisi konsep dan teori *Deterrence* dimana terdapat setidaknya tiga indikator yang merujuk kepada anggapan deterrence tersebut telah berhasil atau tidak yaitu *Level of Aggressor Motivation, Clarity About the Object of Deterrence and Actions the Defender Will Take*, dan *Aggressor Must Be Confident That Deterring State Has Capability and Will to Carry Out Threats.* Di lihat dari sisi aliansi Korea Selatan dengan Amerika Serikat dan sisi Korea Utara, belum ada indikator yang dapat terlewati untuk dapat dikatakan bahwa deterrence telah berhasil di raih.
2. Merujuk pada definisi Neorealisme itu sendiri yaitu konflik terjadi karena struktur internasional yang anarki, kondisi Korea Selatan yang tidak aman yang disebabkan oleh Korea Utara, bukan hanya diakibatkan oleh kompleksitas keamanan regional, melainkan karena kompleksitas kawasan lain pula.

Maka kebijakan *Extended Deterrence* terhadap Korea Utara yang selalu diperpanjang oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat adalah karena daya tangkal yang tercipta tidak berhasil. Begitupun faktor yang membelakangi Korea Utara melakukan hal-hal yang ofensif adalah karena konflik internasional dan tidak hanya terbatas karena kompleksitas di kawasan saja.

* 1. **Kerangka Analisis**

Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan

Kompleksitas Keamanan Internasional

Potensi Ancaman Nuklir dan Rudal Korea Utara

Kepentingan Nasional

*Neorealisme*

Aliansi Korea Selatan-Amerika Serikat & Kebijakan Extended Deterrence

*Extended Deterrence*

*Nuclear Umbrella*

Daya Tangkal Extended Deterrence ROK-AS terhadap DPRK